

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2008 – 2017.

Karyadi, Muhamad
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UGR
Email : muhamadkaryadi01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2017. Metode sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah data 10 tahun terakhir. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Laporan Keuangan Pemerintah. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari t table yaitu $8,524 > 2,364$ dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dibuktikan dengan hasil nilai t hitung lebih kecil dari nilai t table yaitu $0,668 < 2,364$. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena F hitung lebih besar dari F table yaitu $10,687 > 4,74$.

Kata Kunci :Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local taxes and levies on the Original Revenue of East Lombok Regency in 2008 – 2017. The number of samples in this study is the last 10 years data. The data used in secondary in the form of Government Financial Statements. The method analysis is multiple linear regression. Based on the results that the Regional Tax has a significant effect on The Original Local Revenue, proven by the results of t count bigger than t table that is $8,524 > 2,364$ and Regional Retribution influences but not significantly to The original Local Revenue, evidence by the results of t count smaller than t table is $0,668 < 2,364$. While the Regional Tax and Regional Levies have a simultaneous effect on the Regional Original Revenue as evidenced by the result that the F count is greater with F tables is $10,687 > 4,74$.

Keywords : Local Original Revenue (PAD), Regional Tax and Regional Retribution

PENDAHULUAN

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya (Mentayani dkk, 2014: 31).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan

mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalian dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575).

Table 1.1
 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Penerimaan
 Di Kabupaten Lombok Timur 2008-2017.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase
	Target	Realisasi	
2008	42,016,545,975.00	34,904,413,611.26	83.07
2009	44,016,545,975.00	39,762,089,575.90	90.33
2010	43,874,724,630.00	39,468,850,188.00	89.96
2011	64,551,458,803.00	56,005,494,421.94	86.76
2012	87,430,162,709.00	88,327,952,783.15	101.03
2013	145,238,797,422.00	97,249,109,229.85	66.96
2014	205,518,244,665.00	180,308,182,148.09	87.73
2015	242,956,414,985.00	218,906,903,995.09	90.10
2016	253,015,629,929.00	236,147,475,250.90	93.33
2017	415,472,658,983.00	398,088,460,541.31	95.82

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah PAD pada Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008 - 2017 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan kenaikan persentase yang cukup konsisten, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan rancangana nggaran sebelum

perubahan dari PAD Kabupaten Lombok Timur sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan, pengoptimalkan serta pendistribusian PAD Kabupaten Lombok Timur belum maksimal sehingga selalu terjadi selisih angka dari target realisasi.

Tabel 1.2
 Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur
 2008-2017.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	5,545,000,000.00	5,932,732,365.34	106.99
2009	5,545,000,000.00	6,732,003,350.00	91.19
2010	6,297,729,873.00	5,786,301,998.00	91.88
2011	6,727,500,000.00	7,749,518,087.00	115.19
2012	8,028,435,000.00	12,606,905,857.00	157
2013	12,043,000,000.00	15,095,125,584.00	125.34
2014	40,532,735,550.00	26,037,346,711.00	64.24
2015	40,602,735,550.00	33,035,050,805.00	81.36
2016	45,804,857,310.00	48,156,909,752.96	105.13
2017	56,463,655,525.00	61,020,187,603.00	108.07

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka 2018)

Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatana sli daerah juga dapat bersumber dari retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Resmi, 2014: 2). Dengan demikian, retribusi daerah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Tabel 1.3
 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Di Kabupaten Lombok Timur
 2008-2017.

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2008	19,499,375,185.00	17,824,451,144.00	91.41
2009	21,402,475,185.00	19,517,843,706.00	91.19
2010	20,566,362,185.00	19,186,252,067.00	93.29
2011	33,834,472,343.00	30,194,938,363.37	89.24
2012	31,533,495,343.00	25,450,882,558.00	80.71
2013	37,434,495,057.00	32,928,046,119.00	87.96
2014	43,072,924,229.00	24,999,408,079.00	58.04
2015	49,093,979,786.00	35,141,369,080.00	71.58
2016	52,557,750,562.00	32,032,656,104.00	60.95
2017	61,210,910,181.00	37,555,558,782.00	61.35

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka 2018)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disaksikan bersama bahwa meski terbilang cukup konsisten dalam peningkatan retribusi daerah, namun tetap terjadi fruktuasi di dalamnya.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah ini

memberlakukan system *self assessment*, yang berarti wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Sunarto dan Fatimah, 2016: 93). Jadi, retribusi daerah sangat berperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan di Kabupaten Lombok Timur ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu : "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan". Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015: 281).

Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

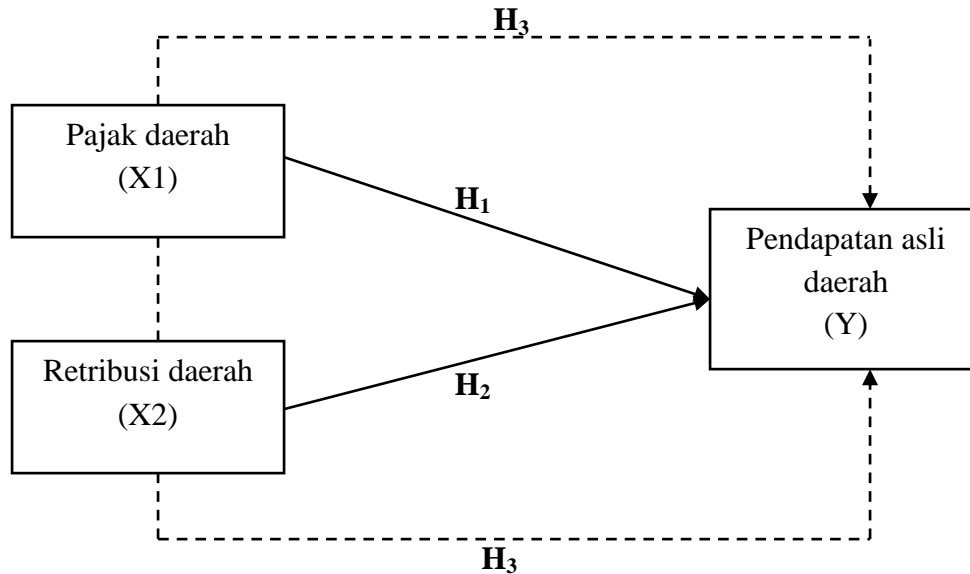
Retribusi Daerah

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 5).

Kerangka Konseptual

Keuangan daerah pada dasarnya meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam hal penerimaan daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Secara parsial : _____

Secara Simultan : - - - - -

Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tariff pajak yang harus dibayarkan.

H1 :Pajak Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar

terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah.

H2 :Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Klasifikasi Dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Klasifikasi Variabel

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka variable-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

Variabel Dependent

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable independen (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam

bahasa Indonesia sering disebut variable terikat. Variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau sebagai akibat, karena adanya varia belbebas (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Sementara variable dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Variabel Independent

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (antecedent variabel) dan dinamakan sebagai variabel yang diduga sebagai sebab dari variable dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variable bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah.

Definisi operasional variable

Berdasarkan klasifikasi variabel yang telah disebutkan, maka dapat diuraikan masing-masing definisi secara operasional variable untuk menjelaskan arah penelitian yang dilakukan.

Variabel Dependent

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Y. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunarto dan Fatimah, 2016: 95). Dalam hal ini pengukuran variable Pendapatan Asli Daerah yaitu diperoleh berdasarkan data data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur yang telah disusun dan dipublikasikan.

Variabel Independent

Variabel independen atau variable bebas dalam penelitian ini adalah factor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), variable dependen dalam penelitian ini meliputi :

1. Pajak daerah (X1)

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005: 1). Dalam penelitian ini, teknik pengukuran variable pajak daerah adalah

berdasarkan data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur yang telah disusun dan dipublikasikan.

2. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sunarto dan Fatimah, 2016: 95). Dalam penelitian ini, pengukuran variable retribusi daerah diperoleh dari data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur yang telah disusun dan dipublikasikan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro dan Supomo, 1999: 13).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Timur 2008-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampelnya, agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti. Metode sampling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008: 122). Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terpublikasi selama 10 tahun terakhir dengan tujuan dapat diketahui

perolehan pajak daerah dan retribusi daerah selama kurun waktu tersebut, yang selanjutnya dapat diketahui pengaruhnya terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 10 tahun terakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Dalam uji hipotesis, data yang digunakan adalah data pajak daerah, retribusi daerah dan data PAD, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
 Analisis Data Penelitian

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2008	5,932,732,365.34	17,824,451,144.00	34,904,413,611.26
2009	6,732,003,350.00	19,517,843,706.00	39,762,089,575.90
2010	5,786,301,998.00	19,186,252,067.00	39,468,850,188.00
2011	7,749,518,087.00	30,194,938,363.37	5,600,549,4421.94
2012	12,606,905,857.00	25,450,882,558.00	88,327,952,783.15
2013	15,095,125,584.00	32,928,046,119.00	97,249,109,299.85
2014	26,037,346,711.00	24,999,408,079.00	180,308,182,148.09
2015	33,035,050,805.00	35,141,369,080.00	218,906,903,995.09
2016	48,156,909,752.96	32,032,656,104.00	236,147,745,250.90
2017	61,020,187,603.00	37,555,558,782.00	398,008,460,541.31
Jumlah	222,152,082,113.30	274,831,406,002.37	1,389,089,201,815.49

Sumber : Data sekunder diolah

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana perubahan variable independen yang lebih dari satu terhadap variable terikat. Adapun hasil pengujian regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS adalah sebagaiberikut

Tabel 4.2
 Hasil Uji Regresi
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.914E10	4.080E10		-.469	.653
Pajak Daerah	5.616	.659	.926	8.524	.000
Retribusi Daerah	1.211	1.814	.073	.668	.526

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Hasil pengolahan SPSS dapat ditunjukkan melalui persamaan regresi linier berganda sebagaiberikut:

$$Y = -1.91410 + 5.616X_1 + 1.211X_2$$

Dari hasil uji regresi linier berganda dapat di deskripsikan sebagaiberikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah -1.914. Hal ini berarti bahwa apabila nilai variable bebas sama dengan nol, maka besarnya variable terikat adalah -1.914.

2. Koefisien regresi $\beta_1 X_1$ Pajak Daerah

Besarnya koefisien regresi variable pajak daerah (X_1) adalah 5.616 dan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Hal ini berarti setiap peningkatan variable pajak daerah akan meningkatkan variable tingkat PAD sebesar 5.616 dengan asumsi variable bebas lainnya adalah tetap.

3. Koefisien regresi $\beta_2 X_2$ Retribusi Daerah

Besarnya koefisien regresi variable retribusi daerah (X_2) adalah 1.211 dan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Hal ini berarti setiap peningkatan variable pajak daerah akan meningkatkan variabel PAD sebesar 1.211 dengan asumsi variable bebas lainnya adalah tetap.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas terhadap pajak daerah, pajak retribusi dan PAD diperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	-.0000370
	Std. Deviation	2.24078136E10
Most Extreme Differences	Absolute	.256
	Positive	.128
	Negative	-.256
Kolmogorov-Smirnov Z		.810
Asymp. Sig. (2-tailed)		.528

a. Test distribution is Normal.

Dari data yang diperoleh selama 10 tahun terakhir atau terdapat 10 sampel yang digunakan, memiliki nilai signifikansi 0,528 yang dapat dilihat dalam kolom Asymp.Sig. (2-tailed). Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila uji normalitas yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 ($Sig > 0,05$). Nilai signifikan dari hasil uji normalitas untuk data mengenai PAD yaitu lebih dari 0,05 ($0,528 < 0,05$) maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian uji hipotesis akan dilakukannya itu dengan analisis regresi linear berganda.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada penelitian ini untuk mengujian ada atau tidaknya multikoleniaritas di dalam model regresi adalah dengan melihat angka Tolerance diatas ($>$) 0,1 melihat nilai VIF di bawah ($<$) 10.

Tabel 4.4

**Hasil Uji Multikolinearitas
 Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.914E10	4.080E10		-.469	.653		
	Pajak Daerah	5.616	.659	.926	8.524	.000	.433	2.312
	Retribusi Daerah	1.211	1.814	.073	.668	.526	.433	2.312

a. Dependent Variable:

Berdasarkan tabel output “coefficients” pada bagian “Collinearity Statistics” diketahui nilai Tolerance untuk variable Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) adalah 0,433 lebih besardari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variable Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) adalah 2,312 < 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Autokolerasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah antara variable terikat dan variable bebas saling mempengaruhi.

**Tabel 4.5
 Hasil Uji Autokorelasi
 Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.964	.954	2.541E10	2.769

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson atas residual persamaan regresi diperoleh angka t-hitung sebesar 2.769. Sebagai pedoman umum Durbin-Watson berkisar 0 dan 4. Jika nilai uji statistik Durbin-Watson lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga, maka residual atau eror dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi autokorelasi. Jadi berdasarkan nilai uji statistik Durbin-Watson dalam penelitian ini berada di atas satu dan dibawah tiga (2.769) sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Uji Statistik

1. Uji t (Parsial)

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua maka dilakukan uji t yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variable bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikatnya. Pada penelitian ini criteria dalam melakukan uji t adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka artinya ada pengaruh yang signifikan antara variable bebas dengan variable terikat. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variable bebas terhadap variable terikat.

Untuk menentukan t table adalah yang pertama dengan menentukan tingkat kepercayaan (α) dibagi dua karena pada uji t melakukan pengujian dua arah.

**Tabel 4.7. Hasil Uji Parsial
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.914E10	4.080E10		-.469	.653
Pajak Daerah	5.616	.659	.926	8.524	.000
Retribusi Daerah	1.211	1.814	.073	.668	.526

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa pada model tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD.

Ha₁: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil statistik uji-t dengan nilai t hitungse besar8,524. t tabeldicari pada signifikansi 0,025 dengan *degree of freedom*=n-k-1 atau 10-2-1=7 hasil diperoleh untuk t table sebesar2.365 (8,524> 2,365) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (0,000< 0,025). Maka H₀₁ ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD.

Ha₁: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil statistik uji-t dengan nilai t hitung sebesar 0.668.

t table dicari pada signifikansi 0,025 dengan *degree of freedom*=n-k-1 atau 10-2-1=7 hasil diperoleh untuk t tabelsebesar2,365 (0.668< 2,365) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,526 (0,526> 0,025). Maka H₀₁ diterima dan Ha₁ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Uji F (Simultan)

Untuk menguji hipotesis selanjutnya maka dilakukan uji F (simultan) yaitu untuk menguji pengaruh yang signifikan dari variable bebas (X) secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel (Y). Cara melihat hasil dari uji F ini adalah Apabila F hitung> F tabel, maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat namun jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat.

**Tabel4.8
 Hasil Uji F (Simultan) TarafSignifikan 5%
 ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.219E23	2	6.094E22	94.401	.000 ^a
	Residual	4.519E21	7	6.456E20		
	Total	1.264E23	9			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai df pembilang (N1) adalah 2 dan df penyebut (N2) adalah 7. Nilai N1 juga dapat dihitung dengan rumus $3 - 1 = 2$ dan N2 dapat dihitung dengan rumus $10 - 3 = 7$. Hal ini menyatakan bahwa F table terdapat pada kolom 2 pada df pembilang dan kolom 7 pada df penyebut yaitu sebesar 4,74.

Melihat nilai F hitung dan F tabel pada penelitian ini. Maka dapat dilihat bahwa F hitung memiliki nilai lebih besar dari F table yaitu $94,401 > 4,74$. Nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,025$) Hal ini menyatakan bahwa variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat PAD.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.

Berdasarkan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($8,524 > 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil ($0,000 < 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dimana tinggi rendahnya tingkat penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Begitu pula dengan penelitian Sunarto Dan Fatimah (2016) menemukan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sama halnya dengan penelitian Putrid dan Rahayu (2015) menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Sejalan juga dengan penelitian Marita dan Suardana (2016) yang menemukan realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017

Berdasarkan Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,668 < 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih besar ($0,526 > 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PAD. Artinya tinggi rendah tingkat

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berbeda pula dengan penelitian Sunarto Dan Fatimah (2016) menemukan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Lain halnya dengan penelitian Putrid dan Rahayu (2015) menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Tidak sejalan juga dengan penelitian Marita dan Suardana (2016) yang menemukan realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

3. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Terhadap PAD Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F table yaitu $94,401 > 4,74$. Hal ini menyatakan bahwa variable pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variable Pendaptan Asli Daerah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah dan pengalokasian retribusi daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukannya itu mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($8,524 > 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil ($0,000 < 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dimana tinggi rendahnya tingkat penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Berdasarkan Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,668 < 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih besar ($0,526 > 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD. Artinya tinggi rendah tingkat Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F table yaitu $94,401 > 4,74$. Hal ini menyatakan bahwa variable pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah dan pengalokasian retribusi daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahwa pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dalam penelitian ini variable independen yang digunakan hanya terbatas pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada satu kabupaten masih ada tingkatan daerah lainnya seperti pemerintah provinsi.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Lombok timur harus melakukan sosialisasi terkait pembayaran iuran baik itu pajak daerah dan retribusi daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah lainnya yang nantinya mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan digiatkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya iuran untuk membangun kesejahteraan bersama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variable independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variabel dependendendensecaralebihluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, 2018. *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2018*
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Ed. Ke-8). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., & Supomo. (1999). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* (Ed. Ke-1). Yogyakarta: BPFE.
- Marita, N.M., dan Suardana, K. A. (2016). Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*.1 (14).53-65.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. .
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Ed. Revisi). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prawoto, A. (2011). *Pengantar keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : teori dan kasus* (Ed. Ke-8). Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, R. D. (2015). Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Citra ekonomika jurnal ekonomi*.1(9).23-36.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Suriadinata. (2003). *Kajian tentang keuangan daerah*. Jakarta. PT Gramedia Utama

Undang-undang Republik Indonesia. (2000).
Undang-undang RI No.34 Tahun 2000
tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-undang Republik Indonesia. (2009).
Undang-undang RI No.28 Tahun 2009
tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-undang Republik Indonesia. (2004).
Undang-undang RI No.33 Tahun 2004 tentang
pajak dan retribusi daerah.